

PERAN PERSATUAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI DPC SAMARINDA) DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SAMARINDA

Gadis Fitra Anugrah¹, Dr. Sukapti, M.Hum²

Abstrak

Penyandang Disabilitas hari ini memiliki ragam permasalahan sosial, mulai dari diskriminasi, marginalisasi, stigma dan kekerasan telah dialami oleh kebanyakan penyandang disabilitas. PPDI sebagai organisasi non-pemerintah yang memiliki peran sebagai fasilitator, edukator, keterampilan teknik dan perwakilan bagi penyandang disabilitas, melalui programnya berusaha untuk memberdayakan penyandang disabilitas guna mengatasi masalah yang dialami disabilitas. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran PPDI DPC Samarinda dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Samarinda. Dalam hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran pemberdayaan yang dilakukan PPDI DPC Kota Samarinda melalui Aras Mikro, Makro dan Mezzo. Dalam pelaksanaan perannya terhadap pemberdayaan PPDI DPC belum mampu menerapkan semua strategi yang ada untuk setiap peran yang dilakukannya karena beberapa faktor penghambat yang dialami. PPDI DPC Kota Samarinda berusaha memaksimalkan pemberdayaan terhadap disabilitas yang ada di Kota Samarinda namun, dengan hambatan minimnya sumber daya manusia serta keterbatasan fisik serta permasalahan personal disabilitas yang tidak memiliki percaya diri, membuat pemberdayaan menjadi belum merata kepada setiap penyandang disabilitas yang ada di Kota Samarinda.

Kata Kunci : Peran, Pemberdayaan, Disabilitas, PPDI dan Penyandang Disabilitas.

Pendahuluan

Penyandang Disabilitas memiliki isu yang cukup kompleks, isu ini harus menjadi perhatian yang serius bagi seluruh aspek masyarakat, kebijakan hari ini mestinya bersifat responsif dan di ciptakan untuk menjamin seluruh pemenuhan hak-hak terhadap penyandang disabilitas. Tetapi kenyataannya pada hari ini masih banyak permasalahan ekonomi sosial serta pendidikan yang dialami oleh para penyandang disabilitas. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengungkapkan setidaknya-tidaknya ada 4 poin permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari yaitu Diskriminasi,

Marginaliasi, Stigma dan Kekerasan, pada hasil pendataan BPS dalam data berjalan tahun 2020, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 22,5 juta

¹ Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: gadisfitraaa@email.com

² Dosen Pembimbing, Dosen Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

jiwa, atau sekitar lima persen dari penduduk di Indonesia. Dalam dunia pekerjaan data pekerja disabilitas masih di dominasi dengan jenis keterampilan sebagai tukang pijat, pertukangan, 3 petani, buruh bahkan pengemis, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat, ada 17,47 juta jiwa dalam usia kerja sedangkan yang bekerja hanya 7,57 juta jiwa di Indonesia pada 2020, ada sekitar 19,79% disabilitas yang bekerja dan memiliki status berusaha dibantu buruh tidak tetap, sekitar 18,76% pekerja disabilitas merupakan pekerja keluarga, 5,36% pekerja bebas pertanian, 3,96% pekerja bebas non-pertanian, dan 3,08% berusaha dibantu buruh tetap. Dapat dipahami bahwasannya kelompok mayoritas disabilitas saat ini tidak memiliki peluang yang sama untuk bekerja, kelompok disabilitas tidak memiliki hak hidup secara mandiri dan tidak dilibatkan dalam masyarakat hari ini. Peluang dalam pekerjaan tentunya harus merata, peluang untuk bekerja juga merupakan hak setiap warga negara.

Dalam (Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1999) tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 42 bahwa “setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan/atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Namun, fakta realitas di masyarakat hari ini, penyandang disabilitas masih menghadapi persoalan tentang kesejahteraan mereka, marginalisasi dan diskriminasi merupakan hal yang sering dialami dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) lahir atas keresahan para penyandang disabilitas demi mencapai partisipasi penuh dan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”. Secara umum, tujuan dari Persatuan Penyandang Disabilitas (PPDI) adalah untuk memperjuangkan tercapainya pembangunan berkelanjutan bagi disabilitas. Di Kota Samarinda sendiri berdasarkan data jumlah penyandang disabilitas oleh PPDI DPC Kota Samarinda, diketahui bahwa jumlah penyandang disabilitas di Kota Samarinda pada tahun 2021 telah mencapai total 872 orang. Untuk di Kota Samarinda PPDI memiliki perwakilan atau cabang organisasi yang terletak di Kota Samarinda, PPDI DPC Samarinda merupakan tempat untuk individu maupun lembaga yang sangat paham dengan kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas. PPDI DPC Samarinda sendiri telah melaksanakan berbagai macam program, dan kebijakan program dan bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena pertambahan yang ada di atas, maka penelitian dalam hal pemberdayaan penyandang disabilitas cukup menarik untuk diangkat, serta hasil paparan di atas peneliti menarik judul penelitian “Peran Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI DPC Samarinda) Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Samarinda”

Kerangka Konsepsional

Peran

Pengertian peran menurut Soerjono (Soekanto, 2002, p. 243) adalah “aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.

Sedangkan menurut Biddle dan Thomas dalam (Sarwono, 2013, p. 224), menyatakan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu”, lebih lanjut Soerjono, Biddle dan Thomas dalam (Sarwono, 2013) membuat peristilahan peran menjadi empat golongan yaitu, “menyangkut, orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, kedudukan orang-orang dalam berperilaku, kaitan antar orang dan perilaku.”

Dari kumpulan teori di atas, peneliti mengartikan peran adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu ataupun Lembaga yang memiliki tingkah laku berdasarkan kedudukannya dan diharapkan dapat berpengaruh terhadap suatu individu, kelompok ataupun lingkungan.

Dari kumpulan teori di atas, peneliti mengartikan peran adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu ataupun Lembaga yang memiliki tingkah laku berdasarkan kedudukannya dan diharapkan dapat berpengaruh terhadap suatu individu, kelompok ataupun lingkungan.

Macam-macam peran.

Menurut (Ife & Tesoriero, 2008, pp. 117–127) peran dalam melakukan pemberdayaan ada 4 macam yaitu;

a. Fasilitator

Fasilitator yaitu “peran-peran yang dijalankan seorang pengembang masyarakat dengan cara memberikan stimulan dan dukungan kepada masyarakat”.

b. Edukator

Edukator yaitu kepada masyarakat. Pengembangan masyarakat akan membuat proses pembelajaran yang dilakukan secara terus menerus dan selalu berusaha untuk mengevaluasi kesalahan dan mengubah pola pikir masyarakat agar menjadi berkembang.

c. Pengembangan Keterampilan Teknik

Pengembangan Keterampilan Teknik berusaha untuk mengembangkan masyarakat agar menerapkan keterampilan lainnya yang dimiliki, contoh: yakni pemakaian komputer, penyajian laporan secara lisan dan tertulis, penanganan proyek pembangunan secara fisik dan lainnya, yang mana semuanya itu sangat membutuhkan keterampilan teknis.

d. Perwakilan

Perwakilan yaitu peran yang dilakukan oleh pengembang masyarakat untuk mengatas namakan kepentingan masyarakat saat berada dalam interaksi dengan lembaga luar.

Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)

Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) merupakan “organisasi payung dan beranggotakan beragam organisasi disabilitas di Indonesia yang didirikan pada tahun 1987”. PPDI memiliki jaringan kerja hampir di seluruh provinsi di Indonesia dan merupakan anggota dari Disabled People Internasional”.

PPDI terlibat aktif, mendorong dan memberikan konsep naskah akademis bagi proses ratifikasi CRPD pada saat pembentukan kebijakan (Indonesia, 2016) UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

PPDI sendiri memiliki tujuan memperjuangkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas agar memperoleh kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan serta dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan nasional.

Pemberdayaan

(Risyanti & Roesmidi, 2006, p. 1) menjelaskan tentang pemberdayaan ialah “kata yang berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan *ber* menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan *pe-* dengan mendapat sisipan *-mdan* akhiran *-an* menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan”.

Gunawan yang di kutip dalam (Hamid, 2018, p. 10) pemberdayaan masyarakat merupakan “suatu tindakan sosial di mana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki”.

Pemberdayaan menurut (Rusmiyati, 2011, p. 16) “suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang yang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya”.

Dari teori di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa pemberdayaan ialah suatu kegiatan atau proses yang bertujuan untuk perbaikan, pemanfaatan serta peningkatan suatu sumber daya demi kepentingan sosial.

Strategi Pemberdayaan

(Edi, 2005, pp. 66–67) Dalam beberapa situasi strategi pemberdayaan dapat dilakukan secara individu, meskipun pada gilirannya tetap berkaitan dengan kolektivitas. Dalam konteks pekerja sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui beberapa strategi pemberdayaan antara lain:

1. Aras Mikro

Pemberdayaan dilakukan secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah melatih masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

2. Aras Mezzo

Pemberdayaan yang dilakukan terhadap sekelompok orang. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya.

3. Aras Makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai “strategi sistem besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini”.

Disabilitas

Undang-undang Hak Asasi Manusia menjelaskan terkait penyandang disabilitas, yaitu “kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Negara, 2009), bahwa “penyandang disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial”.

Ragam Disabilitas

(Indonesia, 2016) Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, istilah Disabilitas merupakan “setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, memiliki hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sehari-hari”. Dalam kebijakan tersebut juga dijelaskan beragam tentang disabilitas sebagai berikut:

1. Disabilitas Fisik adalah “individu yang mengalami keterbatasan mobilitas atau stamina fisik yang mengganggu sistem otot, pernafasan, atau saraf dan gangguan pada fungsi gerak. Disabilitas Fisik dapat terdiri dari Paraplegia, Cerebral Palsy (CP), dan Dwarfism. Paraplegi yaitu hilangnya kemampuan anggota tubuh bagian bawah seperti tungkai dan panggul. Hal tersebut biasa disebabkan oleh faktor genetik dan sumsum tulang belakang.
2. Disabilitas Sensorik adalah “individu yang mengalami keterbatasan pada fungsi alat indera seperti penglihatan dan pendengaran. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh faktor genetik/usia, kecelakaan/cedera, dan kesehatan/penyakit serius. Disabilitas Sensorik terdiri dari 2 kelompok yaitu Disabilitas Pendengaran dan Disabilitas Penglihatan”.
3. Disabilitas mental merupakan “individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Disabilitas Mental terdiri dari Disabilitas Psikososial dan Disabilitas Perkembangan. Disabilitas Psikososial biasa dikenal dengan ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa) atau OMDK (Orang dengan Masalah Kejiwaan). Disabilitas Perkembangan merupakan individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan untuk berinteraksi sosial. Contoh Disabilitas perkembangan yaitu Autisme dan ADHD”.
4. Disabilitas Intelektual adalah “individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. WHO mengatakan Disabilitas Intelektual sebagai berkurangnya kemampuan dalam memahami informasi baru, belajar, dan menerapkan keterampilan baru. Disabilitas Intelektual

dapat dibagi menjadi tiga ragam yaitu gangguan kemampuan belajar, tuna grahita, dan down syndrome”.

5. Disabilitas ganda yaitu ragam disabilitas yang dialami secara ganda dalam jangka waktu lama dan atau bersifat permanen) ditetapkan oleh tenaga kesehatan. Penyandang disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas seperti disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

Metode Penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif yang mana dalam penjelasan hasil penelitian akan lebih banyak menjelaskan mengenai masalah penelitian yang diteliti. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Samarinda. Data yang diambil bisa melalui wawancara terhadap individu dan kelompok, survei melalui observasi atau penelusuran. Data yang telah didapatkan melalui beberapa cara seperti gambar maupun suatu penjelasan yang rinci serta memberikan pemahaman menyeluruh mengenai peran persatuan penyandang disabilitas Indonesia dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Samarinda.

Fokus penelitian dari penelitian ini terbagi dalam beberapa poin yaitu;

1. Peran Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI DPC Samarinda) Terhadap Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Samarinda, mengacu pada teori (Ife & Tesoriero, 2008):

- a. Fasilitator
- b. Edukator
- c. Pengembangan Keterampilan Teknik
- d. Perwakilan

2. Faktor penghambat Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI DPC Samarinda) dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Samarinda.

Untuk teknik pengumpulan data deskriptif kualitatif menurut Milles dan Huberman dalam (sugiyono, 2014, p. 247) “penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Wordk Research*) yang berisikan observasi, wawancara serta dokumentasi”. Sedangkan teknik analisis data Miles dan Huberman dalam (sugiyono, 2014) “kegiatan analisis terdiri dari 4 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi”.

Hasil Penelitian

Peran Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI DPC Samarinda) dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Samarinda.

Demi memfokuskan masalah penelitian ini penulis akan melihat bagaimana peran yang dilakukan dalam pemberdayaan menurut (Ife & Tesoriero, 2008) dengan perspektif strategi pemberdayaan menurut Edi (Edi, 2005).

Pada tahun 2021 jumlah penyandang disabilitas di kota samarinda berjumlah 827 orang dengan rincian sebagai berikut:

Kecamatan/District	Jenis Disabilitas					jumlah
	fisik	sensorik	intelektual	ganda	mental	
Palaran	66	36	10	23	46	181
Loa Janan Ilir	10	22	2	2	1	37
Samarinda Ulu	57	41	5	9	20	132
Samarinda Utara	36	32	1	17	10	96
Samarinda Sebrang	28	20	2	8	-	58
Samarinda Kota	32	14	18	6	6	76
Sungai Kunjang	46	22	-	21	16	105
Sambutan	17	14	6	10	8	55
Sungai Pinang	53	46	7	6	20	132
JUMLAH						872

Banyaknya jumlah penyandang disabilitas Indonesia khususnya di Kota Samarinda seharusnya menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam memberikan kebijakan program yang menyangkut para penyandang disabilitas. Dalam hal pembangunan disabilitas ketenagakerjaan juga terdapat fenomena terjadinya disabilitas pembangunan. Soal regulasi misalnya, hingga awal 2016 peraturan yang masih menjadi acuan adalah Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang mewajibkan perusahaan negara dan swasta untuk menjamin kesempatan bekerja kepada penyandang cacat. Pada bagian Penjelasan Pasal itu ditegaskan bahwa perusahaan yang mempekerjakan 100 orang wajib mempekerjakan satu orang penyandang cacat. Pasal 28 dari UU No. 4 Tahun 1997 juga mengatur sanksi pidana berupa kurungan maksimal enam bulan dan atau denda paling besar 200 juta bagi pelanggar pasal 14. Namun faktanya belum adanya upaya penertiban terhadap perusahaan-perusahaan negara dan swasta yang belum merekrut penyandang disabilitas walupun telah memiliki pekerja melampaui jumlah 100 orang. Sulitnya disabilitas mencari pekerjaan membuat para penyandang disabilitas harus berjuang lebih guna mencari penghasilan. Peran PPDI DPC Kota Samarinda dalam pemberdayaan penyandang Disabilitas Kota Samarinda.

PPDI DPC Kota Samarinda memiliki peran yang signifikan dalam membantu penyandang disabilitas Kota Samarinda bagi mereka, para seluruh penyandang disabilitas harus memiliki hak yang sama dengan non-disabilitas. Untuk mewujudkan masyarakat yang setara organisasi PPDI memiliki peran dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Peran yang dilakukan oleh PPDI DPC Kota Samarinda dapat dijelaskan ragam peran yang dikemukakan oleh Menurut (Ife & Tesoriero, 2008)

1. Fasilitator

PPDI DPC Samarinda membantu memfasilitasi para penyandang disabilitas yang tidak mengenyam pendidikan untuk mendapatkan pendidikan. Serta membuka peluang untuk kerja sama dengan pihak-pihak lain seperti dinas sosial atau lembaga-lembaga lain yang dapat mendukung program-program PPDI DPC

Kota Samarinda dalam pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Banyaknya diskriminasi atau perbedaan perlakuan yang sering muncul apalagi di sektor pekerjaan PPDI DPC Kota Samarinda berusaha mengumpulkan dan menganalisa kebutuhan yang dialami oleh penyandang disabilitas yang mayoritas kebutuhan mereka salah satunya kesulitan mencari pekerjaan, setelah menyerap aspirasi dan keresahan dari penyandang disabilitas tersebut, PPDI DPC Kota Samarinda berusaha untuk membuka peluang-peluang dari hambatan yang dialami menggunakan. Fasilitas yang diberikan dari DPC PPDI mencarikan partner atau mitra untuk memberikan lowongan-lowongan pekerjaan dengan menekan instansi pemerintah ataupun swasta untuk menerima setidaknya 1-2% penyandang disabilitas untuk bisa bekerja di tempatnya. Dengan memberikan fasilitas lowongan pekerjaan, tentunya PPDI telah menjalankan tugasnya untuk memfasilitasi kesulitan yang dialami penyandang disabilitas dengan bantuan stimulan tersebut adalah bentuk dari pemberdayaan yang membuat penyandang disabilitas mampu bekerja dan mendapatkan penghasilan dan menjadikan dirinya sejahtera.

2. Edukator

PPDI DPC Kota Samarinda melakukan peran Edukator dengan menjalin pendekatan emosional kepada para penyandang disabilitas serta membangun kepercayaan diri serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membedakan-bedakan para penyandang disabilitas yang mempunyai hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya.

PPDI menyadarkan penyandang disabilitas melalui secara individu dan kelembagaan, untuk pola Edukator individu dilakukan dengan menjalin kedekatan emosional terhadap penyandang, hal ini dilakukan karena tingkat sensitif yang tinggi biasanya dialami oleh penyandang disabilitas menjadi kesulitan untuk menyadarkan penyandang disabilitas agar mampu berdaya atas dirinya sendiri. Sedangkan untuk internal penyandang disabilitas dengan pola kelembagaan, dilakukan dengan kegiatan atas nama lembaga ke lembaga atau lembaga ke masyarakat secara luas, hal ini berguna untuk menyuarakan anti diskriminatif kepada penyandang disabilitas,

3. Mengembangkan Keterampilan Teknik

PPDI DPC Kota Samarinda dalam peran Pengembangan Keterampilan Teknik yakni berguna untuk membangun kemandirian penyandang disabilitas agar tidak bergantung dengan keluarga ataupun lingkungan sekitar. Peran yang dilakukan PPDI DPC Kota Samarinda sebagai Pengembangan Keterampilan Teknik dalam pemberdayaan penyandang disabilitas yaitu dengan melakukan pelatihan-pelatihan seperti komputerisasi, perbikan handphone, marketing online dan cukur rambut yang bekerja sama dengan Dinas Sosial dan lembaga-lembaga lain. Sehingga dapat mematahkan stigma (stereotype) dan marginalisasi bahwa penyandang disabilitas selalu dianggap sebagai orang yang tidak berdaya dan tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari.

4. DPC PPDI Kota Samarinda bertanggung jawab atas kelompok atau organisasi penyandang disabilitas yang telah terbentuk karena para anggota

kelompok atau organisasi tersebut membutuhkan akses untuk meningkatkan keberdayaan mereka. DPC PPDI Kota Samarinda membangun dan mempermudah jaringan kepada para stakeholder yang memperhatikan nasib para penyandang disabilitas.

5. Peran perwakilan yang dilakukan oleh PPDI DPC Kota Samarinda dalam memberdayakan penyandang disabilitas dengan melakukan perwakilan atau advokasi dalam permasalahan perubahan kebijakan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas serta perwakilan untuk membantu para penyandang disabilitas mewakilkan aspirasinya yang di mana sampai saat masih banyak kasus-kasus kekerasan atau hak-hak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi.

Temuan lain di lapangan menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh PPDI DPC Kota Samarinda telah melaksanakan strategi pemberdayaan menurut (Edi, 2005) dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Sebagai fasilitator dilevel mikro PPDI DPC Kota Samarinda memberikan dukungan bagi para penyandang disabilitas agar bisa mengenyam pendidikan disekolah umum dengan cara membantu administrasi agar tidak dipersulit dengan sekolah umum serta memberi saran-saran ke sekolah yang aksesnya ramah untuk disabilitas untuk di level mezzo mereka Membuka peluang kerja sama dengan pihak-pihak lain seperti dinas sosial atau lembaga lain untuk mendukung program pemberdayaan sedangkan dilevel makro PPDI DPC Samarinda Menekan instansi pemerintahan maupun swasta untuk menerima setidaknya 1-2% disabilitas untuk bekerja.

2. Sebagai edukator dilevel mikro PPDI DPC Kota Samarinda memberikan penyadaran langsung kepada penyandang disabilitas dengan membangun kapasitas diwilayah kognitif, memberikan semangat hidup pada wilayah afeksi serta membangun sikomotorik untuk mereka bisa hidup dan beraktifitas dan di level mezzo PPDI DPC Kota Samarinda melakukan edukasi dengan pola kelembagaan, dilakukan dengan kegiatan atas nama lembaga ke lembaga atau lembaga ke masyarakat secara luas seperti Melakukan FGD dan Sosialisasi kebeberapa kelurahan yang ada di kota Samarinda bekerja sama dengan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) sedangkan di level makro PPDI DPC Kota Samarinda belum mampu menjalankannya.

3. PPDI DPC Kota Samarinda dalam mengembangkan keterampilan teknik di level mezzo Melakukan program-program pelatihan (komputerisasi, service smartphone, barber dan marketing online) dengan bekerja sama dengan dinas-dinas atau lembaga yang dapat membantu pemberdayaan sedangkan di level mikro dan makro PPDI DPC Kota Samarinda belum mampu menjalankannya.

4. Dalam peran perwakilan PPDI DPC Kota Samarinda hanya di level makro saja dengan mengawal kebijakan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas serta melakukan intervensi dan mengawal setiap pekerja disabilitas yang mengalami kesulitan dalam hal mencari pekerjaan ataupun sedang bekerja dan juga melakukan pemantuan kepada pemerintah Kota Samarinda terhadap program PROBEBAYA sedangkan untuk strategi di level mikro dan mezzo PPDI Kota Samarinda belum mampu menjalankannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa peran PPDI dalam melakukan fasilitator berada di level mikro, mezzo dan makro, Edukator hanya di level mikro dan mezzo serta Pengembangan Keterampilan Teknik hanya ditekankan di level mezzo sedangkan untuk peran perwakilan PPDI DPC Kota Samarinda hanya ada di level makro. PPDI DPC Kota Samarinda telah menjalankan tugas dan fungsinya, meski terkendala sumber daya manusia dan pendanaan tidak menjalankan seluruh aras di tiap-tiap peran organisasinya, oleh karena itu PPDI DPC lebih sering menjalankan program kegiatan dengan menggandeng LSM maupun Stakeholder yang sejalan dengan tujuannya, sedangkan untuk melakukan kegiatan sendiri terbilang tidak mudah untuk di jalankan bagi PPDI DPC Kota Samarinda.

Faktor-faktor penghambat PPDI DPC Samarinda dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Samarinda.

Hambatan PPDI DPC Samarinda dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Samarinda terangkum dalam beberapa poin, antara lain:

1. Banyaknya keluarga penyandang disabilitas yang menyembunyikan anggota keluarganya karena mereka beranggapan bahwa penyandang disabilitas adalah aib atau kutukan keluarga yang harus disembunyikan sehingga mereka merasa malu dan sulitnya merangkul para penyandang disabilitas dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang beranggapan penyandang disabilitas adalah makhluk nomor 2.
2. Kurangnya partisipasi dari anggota PPDI DPC Kota Samarinda sendiri dikarenakan mereka mempunyai kesibukan lain diluar dari PPDI seperti bekerja sehingga membuat beberapa program tidak terjalankan dengan maksimal serta tidak ada adanya sumber dana yang pasti membuat PPDI DPC Kota Samarinda tidak maksimal dalam menjalankan program-programnya.
3. Sulitnya pendataan penyandang disabilitas menjadi masalah bagi DPC PPDI Kota Samarinda, karena pemberdayaan akan mengena lebih luas kepada penyandang disabilitas jika penyandang disabilitas diketahui jumlah serta letaknya dimana. Jika si penyandang disabilitas diketahui alamatnya maka pemerintah serta DPC PPDI Kota Samarinda akan lebih gampang dalam melakukan advokasi atau pemberdayaan yang sesuai dengan si penyandang disabilitas.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-harinya masih sering mendapatkan diskriminasi, stigma, marginalisasi dan kekerasan permasalahan tersebut yang membuat mereka menjadi tidak berdaya. Oleh karena itu kehadiran PPDI DPC Kota Samarinda hadir yang kemudian menempatkan perannya ditengah-tengah penyandang disabilitas dan memberikan perubahan terhadap penyandang disabilitas karena peran-peran yang mereka lakukan dalam pemberdayaan.

Ada empat peran Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI DPC Samarinda) dalam upayanya untuk memberdayakan penyandang disabilitas sebagai berikut:

1. Fasilitator, PPDI DPC Samarinda telah memberikan dukungan-dukungan kepada penyandang disabilitas. Banyaknya diskriminasi atau perbedaan perlakuan yang sering muncul apalagi di sektor pekerjaan PPDI DPC Kota Samarinda berusaha mengumpulkan dan menganalisa kebutuhan yang dialami oleh penyandang disabilitas
2. Edukator, PPDI DPC Kota Samarinda melakukan peran Edukator dengan menjalin pendekatan emosional kepada para penyandang disabilitas serta membangun kepercayaan diri serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dari disabilitas maupun non-disabilitas yang berguna untuk memaksimalkan pemberdayaan terhadap disabilitas, dan upaya yang dilakukan adalah gerakan untuk menyadarkan secara internal dan eksternal maupun secara formal dan informal.
3. Mengembangkan Keterampilan Teknik, Tidak berdayanya penyandang disabilitas akibat banyaknya ketidakadilan yang masih mereka alami sampai sekarang harus disikapi dengan bijak. Berangkat dari masalah tidak berdayaan dan ketidakadilan tersebut PPDI berusaha memberikan pemberdayaan melalui pelatihan-pelatihan contohnya perbaikan *handphone*, barber, *marketing online* yang dimana pelatihan ini juga menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan mereka.
4. Perwakilan, Peran perwakilan yang dilakukan oleh PPDI DPC Kota Samarinda dalam memberdayakan penyandang disabilitas dengan melakukan perwakilan atau advokasi dalam permasalahan perubahan kebijakan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas serta perwakilan untuk membantu para penyandang disabilitas mewakili aspirasinya yang dimana sampai saat masih banyak kasus-kasus kekerasan atau hak-hak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi.

Dalam pemberdayaan penyandang disabilitas PPDI DPC Kota Samarinda melakukannya dengan menggunakan Strategi pemberdayaan menurut (Edi, 2005) yaitu:

1. Aras *Mikro*: PPDI DPC Kota Samarinda melakukan sentuhan langsung kepada para penyandang disabilitas dalam melakukan dukungannya serta mendorong atau menyadarkan penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari serta memberikan mereka wadah untuk berekspresi.
2. Aras *Mezzo*: PPDI DPC Kota Samarinda melakukan pelatihan agar dapat meningkatkan kualitas hidup para penyandang disabilitas dengan menggandeng LSM atau *Stakeholder* yang dapat selaras dalam membantu pemberdayaan penyandang disabilitas Kota Samarinda.
3. Aras *Makro*: PPDI DPC Kota Samarinda mengawal kebijakan-kebijakan yang dapat mendiskriminasi penyandang disabilitas dan penyambung lidah untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kepada pemerintah.

PPDI DPC Kota Samarinda tidak menerapkan semua strategi yang ada untuk setiap peran yang dilakukan dalam proses pemberdayaan penyandang disabilitas dikerankan oleh faktor-faktor penghambat yang ada.

Rekomendasi

1. Bagi Masyarakat
 - a. Disabilitas

Penyandang Disabilitas harus meningkatkan kepercayaan diri dan lebih terbuka kepada dunia luar serta percaya akan kemampuan yang dimiliki. menyadari bahwa mempunyai keterbatasan yang dimiliki bukan berarti tidak bisa berkarya. Karena, dibalik keterbatasan tentu ada potensi luar biasa yang harus dikembangkan.

b. Non-disabilitas

Seluruh masyarakat, terutama masyarakat Kota Samarinda agar menghilangkan pandangan atau stigma negatif dan harus lebih menghargai serta membantu penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-harinya.

2. Bagi PPDI DPC Kota Samarinda

Dipertahankan atau ditingkatkan lagi agar kesetaraan dan keadilan penyandang disabilitas di Kota Samarinda semakin terjamin dan Tingkatkan lagi intensitas diskusi-diskusi tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas serta lebih merangkul para penyandang disabilitas agar kepercayaan diri dari penyandang disabilitas terbangun.

3. Bagi Pemerintah

Perlunya memperkuat kebijakan hukum bagi penyandang disabilitas untuk memenuhi segala kebutuhan para disabilitas terutama kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan dan Program-program pemerintah khususnya Kota Samarinda bisa masuk aturannya kepada penyandang disabilitas, terkait akses dan kebutuhan penyandang disabilitas agar bisa terpenuhi dari tingkat tertinggi sampai tingkat RT.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrita, D. C., Hidir, A., Rawa, M., & Amady, E. (2022). Tilan Island Tour in Rantau Bais Tourism Village: From Festival To Eco-tourism: *Progress In Social Development*, 3(1), 12–20. <https://doi.org/10.30872/PSD.V3I1.33>
- Aney, H., & Suryaningsih, N. (2021). Evaluation of Forest and Climate Change Empowerment Programs of Long Laai Village, Kecamatan Segah Berau District: *Progress In Social Development*, 2(1), 13–20. <https://doi.org/10.30872/PSD.V2I1.25>
- Asdaq, T. M. (2022). Impact of Corporate Social Responsibility on Social Economic Changes in Belibak Village Community: *Progress In Social Development*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.30872/PSD.V3I1.34>
- Edi, S. (2005). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat. *Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, Bandung: Refika Aditama.
- Fitriyah, N., Fauzia, E., Jannah, S., & Yahya, B. (2022). Penyuluhan Kesehatan tentang Anemia pada Ibu Hamil di Desa Talabiu Kabupaten Bima. *Idea Pengabdian Masyarakat*, 2(04), 219–223. <https://doi.org/10.53690/IPM.V2I04.149>
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. De La Macca.
- Hidayat, H., Jafar, M., Sonnenfeld, D. A., Wyatt, S., Imang, N., & Nanang, M. (2022). Contribution of Sumalindo Company: In Managing Forest Resources with Local Communities: Mahakam Ulu-East Kalimantan.

- Journal of Environmental Science and Engineering B*, 11, 111–124.
<https://doi.org/10.17265/2162-5263/2022.04.003>
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 265.
- Indonesia, R. (2016). Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. *Jakarta: Sekretariat Negara*.
- Islamiyah, P. R., & Muhtadi, M. (2022). Women Empowerment in Improving Family Welfare Through Red Ginger Cultivation: *Progress In Social Development*, 3(2), 55–62. <https://doi.org/10.30872/PSD.V3I2.39>
- Laksono, A. D., Fatmawati, M., Ardiansyah, A. N., & Harahap, R. N. (2022). Establishment of A Care Group in The Satya Gawa Program To Enhance The Quality of Life of People With Mental Disorders: *Progress In Social Development*, 3(2), 75–86. <https://doi.org/10.30872/PSD.V3I2.41>
- Masliawati, S., & Zuska, F. (2021). Circle Fish: Social-economic Locomotive of Perlis Village: *Progress In Social Development*, 2(2), 42–52. <https://doi.org/10.30872/PSD.V2I2.29>
- Maurani, S. A. S., Sukapti, S., & Nasir, B. (2021). The Role of The Ethnic Borneo Studio as An Empowered Community in The Development of Traditional Arts in The City of Samarinda: *Progress In Social Development*, 2(2), 58–66. <https://doi.org/10.30872/PSD.V2I2.31>
- Negara, S. (2009). *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*. Jakarta.
- Nikita, T., & Hijjang, P. (2022). Ethnographic Study of Changes In Tradition of The Petalangan Tribe In Tambak Village: *Progress In Social Development*, 3(1), 44–54. <https://doi.org/10.30872/PSD.V3I1.37>
- Pengelolaan, S., Rumah, S., Di, T., Lok, K., Kecamatan, B., Kunjang, S., Samarinda Jumar, K., Fitriyah, N., & Kalalinggi, R. (2017). STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KELURAHAN LOK BAHU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA. *Jurnal Administrative Reform*, 2(1), 101–112. <https://doi.org/10.52239/JAR.V2I1.503>
- Risyanti, R., & Roesmidi, M. (2006). Pemberdayaan Masyarakat. *Sumedang Alqaprint Jatinangor*.
- Rusmiyati, C. (2011). Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah. *Yogyakarta: B2P3KS*.
- Sarwono, S. W. (2013). *Teori-teori psikologi sosial*.
- Soekanto, S. (2002). Teori peranan. *Jakarta: Bumi Aksara*.
- sugiyono. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 13(2), 177–181.
- Suhartini, S., Mustangin, M., Lukman, A. I., & Winarti, H. T. (2022). Empowerment of Housewives in Processing Bawis Fish Chips in The

- Home Industry Abadi Rasa: *Progress In Social Development*, 3(2), 87–93. <https://doi.org/10.30872/PSD.V3I2.42>
- Sukapti, S., & Murlianti, S. (2021). Meningkatkan Kesadaran Ekologis Warga di Kawasan Tepian Sungai Karang Mumus di Kota Samarinda. *Jurnal Abdimas Mahakam*, 5, 131–139. <https://doi.org/10.24903/jam.v5i2.1411>
- Yeni, U. A. F., & Hambali. (2022). Anambas Island Coastal Empowerment Strategy For Development Facilities And Infrastructure: *Progress In Social Development*, 3(1), 21–32. <https://doi.org/10.30872/PSD.V3I1.35>
- Zuldiansyah, M. F., & Zuska, F. (2022). Ethnographic Gayo Community Of Tampur Paloh Village In The Lower Tamiang River, Simpang Jernih District, East Aceh Regency, Aceh Province: *Progress In Social Development*, 3(1), 33–43. <https://doi.org/10.30872/PSD.V3I1.38>